

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 April 2018, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang memuat ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri 6 LHP Keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP Dengan Tujuan Tertentu, yang berisi hasil pemeriksaan:

1. Opini atas 6 Laporan Keuangan (5 LKPD Tahun 2016 dan 1 Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat);
2. Simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah serta; dan
3. Simpulan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHPS II Tahun 2017 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD, dan BUMN serta badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan; pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara

transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga Komisi IX yang terdiri dari 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja, antara lain:

1. Kementerian/Lembaga dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kementerian Kesehatan yaitu Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Bali *dengan 12 temuan dan nilai temuan sebesar Rp10.182.190.000,00*,
 - b. Kementerian Kesehatan yaitu Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji pada Kementerian Kesehatan di Jakarta dan Arab Saudi *dengan 8 temuan dan nilai temuan sebesar Rp97.861.960.000,00,-*,
 - c. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yaitu Pemeriksaan Pengelolaan Barang dan Jasa pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah *dengan 8 temuan*.
2. Kementerian/Lembaga dalam Pemeriksaan Kinerja, antara lain:
 - a. Pemeriksaan kinerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPOM *dengan 2 temuan*,
 - b. Pemeriksaan kinerja pada Kementerian Kesehatan atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan JKN di Kementerian Kesehatan *dengan 3 temuan*,
 - c. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan JKN di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita *dengan 4 temuan, dan*

- d. Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan JKN di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo *dengan 4 temuan.*
- e. Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan *dengan 2 temuan.*
- f. Pemeriksaan atas Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pelayanan Klaim Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *dengan 12 temuan.*

Dalam penyusunan Ringkasan dan Telaahan ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengundang Para Pakar/Peneliti serta Auditorat Keuangan BPK RI untuk berdiskusi dan kami juga menyajikan dalam bentuk infografis yang dapat memudahkan pemahaman tentang hasil pemeriksaan BPK RI yang terperinci dan memuat tentang Penjelasan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Akibat serta Rekomendasi.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Jakarta, April 2018

DRS. HELMIZAR

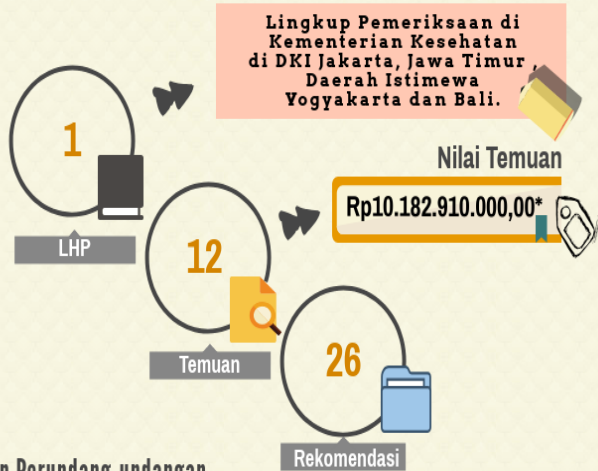
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
2.	Daftar Isi.....	iv
3.	Kementerian Kesehatan	
	PDDT atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja TA 2016 dan Semester 1 Tahun 2017 pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta , Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali.	
	Infografis.....	1
	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	2
	Daftar Temuan.....	4
	PDDT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semeste I Tahun 2017 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi lainnya di Jakarta dan Arab Saudi.	
	Infografis.....	35
	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	36
	Daftar Temuan.....	38
4.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	
	PDDT atas Pengelolaan Barang dan Jasa pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2017.	
	Infografis.....	60
	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	61
	Daftar Temuan.....	63
5.	Kementerian Kesehatan	
	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Obat dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 di Kementerian Kesehatan dan Instansi terkait lainnya.	
	Infografis.....	72
	Daftar Temuan.....	73
	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Obat dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 di Rumah Sakit	

Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan Instansi terkait lainnya.	
Infografis.....	85
Daftar Temuan.....	86
Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Obat dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Instansi terkait lainnya.	
Infografis.....	97
Daftar Temuan.....	98
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan	
Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Obat dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi terkait lainnya.	
Infografis.....	109
Daftar Temuan.....	110
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	
Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya.	
Infografis.....	118
Daftar Temuan.....	119
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	
Pemeriksaan atas Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pelayanan Klaim Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 (Semester 1)	
Infografis.....	124
Daftar Temuan.....	125

Hasil Pemeriksaan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Kerugian Negara ...)	Rp5.641.890.000,00*	Kekurangan Penerimaan ...)	Rp502.360.000,00*
Potensi Kerugian Negara ...)	Rp11.740.000,00*	Ketidakhematan ...)	Rp4.027.000.000,00*

*) Sumber: Lampiran 2.1 IHPS II 2017

Kesimpulan Pemeriksaan



Pendapatan dan Belanja TA 2016 dan TA 2017
(Semester 1) pada Kementerian Kesehatan
belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TA 2016 DAN TA 2017 (SEMESTER I)
PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN
DI DKI JAKARTA, JAWA TIMUR, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN BALI**

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan pendapatan dan belanja terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pemeriksaan BPK, Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester 1) pada Kementerian Kesehatan **belum sepenuhnya sesuai** dengan peraturan yang berlaku.

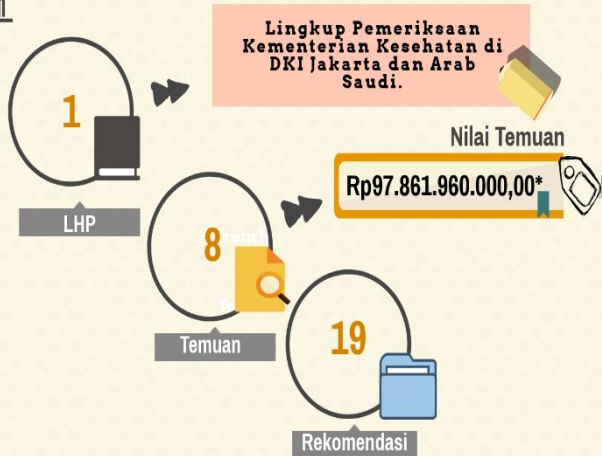
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Penetapan tarif farmasi RSUP Sanglah tidak sesuai dengan PMK Nomor 148/PMK.05/2013.
2	Tertundanya penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp53.175.060,00 pada Direktorat Promosi Kesehatan.
3	Prosedur pemanfaatan aset pada 4 (empat) Satker Kemenkes belum sesuai ketentuan.
4	Pemecahan kontrak pengadaan pada Poltekkes Kemenkes Malang.
5	Bukti pertanggungjawaban pengadaan BBM senilai Rp16.600.000,00 pada RSUP Dr. Sardjito kurang dilaksanakan.
6	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pada 5 (lima) Satker.
7	Ketidaksesuaian volume pekerjaan sebesar Rp2.881.863.489,41 atas pekerjaan fisik pada 7 (tujuh) Satker.

8	Ketidaksesuaian volume atas pekerjaan di luar pekerjaan fisik pada tiga Satker.
9	Prosedur pengadaan barang jasa pada 2 (dua) Satker tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
10	Pekerjaan subkontrak yang tidak sesuai ketentuan pada tiga Satker.
11	Perencanaan pengadaan jasa <i>call center</i> tidak memadai
12	Pelaksanaan pekerjaan <i>placement</i> ILM tentang program prioritas Kementerian Kesehatan RI tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Penjelasan terhadap temuan-temuan diatas akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana berikut:

Hasil Pemeriksaan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Kerugian Negara	...>	Rp2.113.980.000,00*
Ketidakhematan	...>	Rp91.864.530.000,00*
Ketidakefektifan	...>	Rp4.027.000.000,00*

*)Sumber : Lampiran 2.1 IHPS II 2017

Kesimpulan Pemeriksaan



Pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penyelenggaraan kesehatan haji belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
SEMESTER I TAHUN 2017
PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN INSTANSI TERKAIT
LAINNYA
DI JAKARTA DAN ARAB SAUDI.**

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk:

1. Menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai.
2. Menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.
3. Menguji apakah aset-aset hasil pengadaan telah dikelola sesuai ketentuan dan telah dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penyelenggaraan kesehatan haji pada Kementerian Kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan maupun kelemahan pengendalian internal, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Kesimpulan ini dikemukakan berdasarkan temuan-temuan berikut:

NO	TEMUAN
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Perbekkes) pada Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan belum memadai
2	Kelebihan pembayaran sebesar Rp364.272.333,33 dan kemahalan HPS sebesar Rp153.318.784,00 pada pengadaan transportasi perjalanan PPIH (non kloter) tahun 2017
3	Pengadaan obat dan Perbekkes Haji TA 2017 belum sesuai ketentuan
4	Keputusan tidak memperpanjang KKHI Makkah di Khalidiyah tidak cermat dan menimbulkan permasalahan hukum
5	Pembayaran sewa dan penyerahan gedung untuk KKHI Makkah TA 2017 tidak sesuai ketentuan
6	Ketidakhematan pengadaan vaksin <i>Meningitis Meningokokus</i> untuk haji dan umrah TA 2017 sebesar Rp70.711.218.000,00
7	Terdapat realisasi pada kegiatan biaya <i>pra</i> dan <i>pasca</i> operasional kesehatan haji yang tidak sesuai ketentuan
8	Pengelolaan persediaan obat dan Perbekkes Haji pada penyelenggaraan haji TA 2017 belum dilaksanakan secara tertib.

Penjelasan terhadap temuan-temuan tersebut diuraikan sebagai berikut :



Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional Kesehatan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2015 s.d Semester Tahun 2017

Hasil Pemeriksaan



Lingkup Pemeriksaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.



LHP

Terdapat realisasi belanja modal pengadaan konstruksi gedung dan bangunan melalui perikatan kontrak yang belum sesuai dengan ketentuan.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp4.929.614.904,58
Kekurangan penerimaan Negara sebesar Rp240.720.090,25



Temuan

Terdapat kurang bayar denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran serta pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pekerjaan pengadaan jasa konsultan di BPJS Kesehatan.

Kekurangan penerimaan Negara Rp24.479.500,00
Kelebihan pembayaran Rp228.000.000,00
Pembayaran biaya langsung non personil tidak dapat diyakini Rp155.850.000,00



Rekomendasi

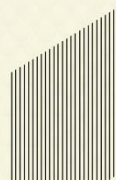
Kelebihan bayar atas Pengadaan Lisensi Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition dan Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition sebesar Rp8.828.044.208,00

*) Sumber: LHP BPJS Kesehatan II 2017

Kesimpulan Pemeriksaan



Sistem pengendalian intern atas proses pengadaan barang dan jasa lainnya belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara memadai.



**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS
PENGELOLAAN BARANG DAN JASA
PADA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2016 S.D SEMESTER I 2017
DI DKI JAKARTA, JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH**

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK ini bertujuan untuk menilai apakah: (1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan (2) Pelaksanaan anggaran sudah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern atas proses pengadaan barang dan jasa lainnya **belum sepenuhnya** dirancang dan dilaksanakan secara memadai. Hal-hal tersebut ditunjukkan dari beberapa temuan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Terdapat Realisasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung dan Bangunan Melalui Perikatan Kontrak yang belum sesuai dengan ketentuan.
2	Terdapat kurang bayar denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran serta pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan di BPJS Kesehatan.
3	Terdapat realisasi belanja barang melalui perikatan kontrak yang belum sesuai dengan ketentuan.

4	Terdapat ketidakhematan pada pekerjaan Pengadaan Media <i>Placement</i> , Pengadaan Jasa Monitoring dan Pemeliharaan <i>Data Center</i> , Sewa Gedung Kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional V Dan Sewa Gedung Kantor BPJS Kesehatan Cabang Banjar.
5	Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengurusan Pengurusan IMB untuk 3 (tiga) Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor BPJS Kesehatan senilai Rp396.000.000,00 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.
6	Kelebihan bayar atas Pengadaan Lisensi Microsoft SQL <i>Server 2014 Enterprise Edition</i> dan Microsoft SQL <i>Server 2016 Enterprise Edition</i> sebesar Rp8.828.044.208,00.
7	PPN Iklan Layanan Masyarakat di BPJS Kesehatan atas Pekerjaan Media <i>Placement</i> Tahun 2015 dan 2016 tidak dikenakan sebesar Rp4.064.093.130,91.
8	Perencanaan atas pengelolaan <i>upgrade storage</i> DRC dan <i>enterprise data warehouse</i> kurang cermat dan pemanfaatannya tidak tepat waktu.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah temuan-temuan mengenai Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang signifikan sebagaimana tercantum dalam tabel no. 1, 2, dan 6.



Kementerian Kesehatan

Pemeriksaan Kinerja
atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017
di Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya.

Hasil Pemeriksaan



Temuan



Rekomendasi

1. Badan POM belum berperan secara memadai dalam perencanaan obat JKN.
2. Pengadaan dan penyediaan obat JKN belum dilakukan secara memadai.
3. Monitoring dan Evaluasi serta penanganan pengaduan/keluhan atas pengelolaan obat JKN belum dilakukan secara memadai.



Kementerian Kesehatan
belum sepenuhnya efektif
dalam melakukan pengelolaan
obat dalam penyelenggaraan JKN



[http://puskajiakn.dpr.
go.id](http://puskajiakn.dpr.go.id)

IHPS II

Tahun
2017

Kementerian Kesehatan

Pemeriksaan Kinerja
atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017
di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah dan Instansi Terkait Lainnya.

Hasil Pemeriksaan

4

Temuan

7

Rekomendasi

1. Proses penyusunan perencanaan kebutuhan obat pada RSJPD Harapan Kita belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai
2. Pengadaan dan penyediaan obat JKN belum dilakukan secara memadai.
3. Pemberian/penggunaan obat kepada pasien JKN di RSJPD Harapan Kita belum sepenuhnya memadai.
4. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan obat dalam penyelenggaraan program JKN di RSJPD Harapan Kita belum memadai.

 **Kesimpulan
Pemeriksaan**


RSJPD Harapan Kita **belum sepenuhnya efektif** dalam melakukan pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN

[http://puskajiakn.dpr.
go.id](http://puskajiakn.dpr.go.id)



Kementerian Kesehatan

Pemeriksaan Kinerja
atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017
di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
dan Instansi Terkait Lainnya.

Hasil Pemeriksaan




Temuan

1. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM) telah menyusun Rencana Kebutuhan Obat namun belum sepenuhnya memadai
2. RSUPN-CM telah melakukan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat namun belum sepenuhnya memadai.
3. RSUPN-CM telah memberikan obat kepada pasien JKN sesuai haknya namun belum sepenuhnya memadai
4. RSUPN-CM telah melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) Pengelolaan Obat dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) namun belum memadai.



Rekomendasi



Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM) **belum sepenuhnya efektif** dalam melakukan pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN

<http://puskajiakn.dpr.go.id>



Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pemeriksaan Kinerja
atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017
di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya

Hasil Pemeriksaan




Temuan

1. Badan POM belum berperan secara memadai dalam perencanaan obat JKN.
2. Pengawasan obat JKN oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan belum dilakukan secara memadai sesuai ketentuan.



Rekomendasi



Badan Pengawas Obat dan Makanan **belum sepenuhnya efektif** melakukan pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN

<http://puskajiakn.dpr.go.id>



Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan

Pemeriksaan Kinerja
atas Pengelolaan Obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017
di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
dan Instansi lainnya

Hasil Pemeriksaan



Temuan

1. BPJS Kesehatan belum optimal dalam memberikan pembiayaan pelayanan obat di luar paket sesuai ketentuan.
2. BPJS Kesehatan belum optimal dalam bekerja sama dengan Apotek untuk menjamin pemenuhan obat PRB.



Rekomendasi



BPJS Kesehatan
belum sepenuhnya efektif
melakukan pembiayaan obat
dalam penyelenggaraan JKN

[http://puskajiakn.dpr.
go.id](http://puskajiakn.dpr.go.id)

IHPS II

Tahun
2017

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pemeriksaan Kinerja
atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam
Pelayanan Klaim Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
TA 2016 s/d TA 2017 (Semester I)

Hasil Pemeriksaan

3

Temuan
Peraturan
Kebijakan

1

Temuan
Sumber
Daya
Manusia

9

Temuan
Pelaksanaan
Pelayanan
Klaim

25

Rekomendasi

Kesimpulan
Pemeriksaan

BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan pelayanan klaim **belum sepenuhnya efektif** dalam aspek kebijakan dan peraturan pelayanan klaim, aspek sumber daya manusia serta pelaksanaan pelayanan klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

<http://puskajiakn.dpr.go.id>